

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi kodratnya memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup ekosistem di bumi. Manusia diberi kelebihan akal dan fikiran untuk mengelola bumi agar terciptanya kelestarian lingkungan hidup, sehingga manusia dengan makhluk hidup lainnya dapat hidup berdampingan tanpa merusak alam.

Namun pada kenyataannya, banyak manusia yang tidak memahami hal tersebut. Aktivitas dan kegiatan manusia sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak sadar banyak merusak alam. Sehingga keseimbangan ekosistem di bumi terganggu yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam. Diantaranya kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air dan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan banjir.<sup>1</sup> Selain itu, manusia juga penyebab utama pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap sehingga membahayakan kesehatan manusia.<sup>2</sup>

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah bersama yang dirasakan oleh seluruh negara yang ada di dunia sehingga masalah lingkungan hidup ini masuk sebagai salah satu tujuan global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan lanjutan dari *Millenium Development Goals*

---

<sup>1</sup> <http://www.bimbie.com/usaha-mencegah-banjir.htm> diakses 6 Maret 2016 Pukul : 20.00 Wib

<sup>2</sup> <http://www.bnpb.go.id/berita/2577/masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana-asap> diakses 6 Maret 2016 Pukul : 20.00 Wib

(MDGs) yang disepakati oleh 193 Negara Perserikaan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 15-27 September 2015 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dari 17 tujuan global *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat 3 tujuan global yang berfokus terhadap permasalahan lingkungan hidup. Yaitu pada butir *empat belas*, Aksi Terhadap Iklim: Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Butir *lima belas*, Kehidupan Bawah Laut: Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. Dan butir *enam belas*, Kehidupan di Darat: Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang tidak luput dari permasalahan lingkungan. Dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, menjadikan negara Indonesia rentan terhadap permasalahan lingkungan.<sup>4</sup> Manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk yang semakin padat akan berdampak pada tekanan lingkungan. Karena manusia membutuhkan lahan pemukiman, sehingga lahan menjadi sempit dan

---

<sup>3</sup> <http://4muda.com/mengenal-17-tujuan-global-global-goals-sebagai-kelanjutan-dari-tujuan-pembangunan-millennium-millennium-development-goals/> diakses 6 Maret 2016 Pukul : 20.00 Wib

<sup>4</sup> <https://fransiscofaldo.wordpress.com/2014/06/14/pengaruh-pertambahan-penduduk-terhadap-keseimbangan-lingkungan-dan-kelestarian-alam/> diakses 8 Maret 2016 Pukul : 11.00 Wib

berkurangnya ruang terbuka hijau. Meningkatnya jumlah penduduk juga berdampak pada bertambahnya konsumsi masyarakat. Sampah rumah tangga menjadi bertambah, sedangkan tempat pembuangan terbatas sehingga sampah menumpuk. Sampah yang menumpuk, merupakan pusat penyebaran penyakit tertentu, misalnya tifus, kolera, dan disentri.<sup>5</sup>

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, karena dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.<sup>6</sup>

Permasalahan lingkungan seperti peningkatan jumlah volume sampah juga terjadi di Sumatera Barat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada distribusi penduduk provinsi Sumatera Barat pada berbagai daerah tingkat dua (Kota dan Kabupaten).

---

<sup>5</sup> <http://duniabiologi45.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-meningkatnya-populasi-penduduk.html> diakses 8 Maret 2016 Pukul : 11.00 Wib

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/ Kota		Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab.Kep. Mentawai	6.011,35	77.376	78.511	81.801	83.603	85.295
2	Kab.Pesisir Selatan	5.794,95	433.632.	437.638	442.723	446.479	450.186
3	Kab. Solok	3,738,00	351.976	355.077	358.371	361.095	363.684
4	Kab. Sijunjung	3.130,80	204.738	207.474	214.644	218.588	222.512
5	Kab.Tanah Datar	1.336,00	340.893	342.991	342.915	343.875	344.828
6	Kab.Padang Pariaman	1.328,79	394.143	396.883	400.880	403.530	406.076
7	Kab. Agam	2.232,30	459.487	463.719	469.028	472.995	476.881
8	Kab.Lima Puluh Kota	3.354,30	352.396	355.928	361.597	365.389	368.985
9	Kab.Pasaman	4.447,63	256.226	258.929	263.804	266.888	269.883
10	Kab.Solok Selatan	3.346,20	146.422	148.437	153.887	156.901	159.796
11	Kab Dharmasraya	2.961,13	195.103	198.614	210.689	216.928	223.112
12	Kab Pasaman Barat	3.387,77	371.000	376.548	392.922	401.624	410.307
13	Kota Padang	694,96	844.316	854.336	876.676	889.561	902.413
14	Kota Solok	57,64	60.301	61.152	63.525	64.819	66.106
15	Kota Sawah Lunto	273,45	57.493	58.068	58.991	59.608	60.186
16	Kota Padang Panjang	23,00	47.619	48.187	49.471	50.208	50.883
17	Kota Bukittinggi	25,24	112.912	114.415	118.319	120.491	122.621
18	Kota Payakumbuh	80,43	118.435	119.942	123.652	125.690	127.826
19	Kota Pariaman	73,36	79.992	80.870	82.580	83.610	84.709
<b>Sumatera Barat</b>		<b>42.297,30</b>	<b>4.904.460</b>	<b>4.957.719</b>	<b>5.066.476</b>	<b>5.131.882</b>	<b>5.196.289</b>

Sumber : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar 2007-2015 (BPS Provinsi Sumbar)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penduduk di Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penduduk di wilayah perkotaan di Sumatera Barat tidak sebanding dengan luas wilayah, sehingga terjadinya penumpukan penduduk di daerah perkotaan. Penumpukan penduduk di daerah perkotaan menyebabkan permasalahan lingkungan di daerah perkotaan

lebih kompleks, salah satunya peningkatan volume sampah. Gubernur Sumatera Barat menyampaikan agar bupati dan walikota agar memperhatikan pengelolaan sampah supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat.<sup>7</sup>

Peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang juga diikuti peningkatan jumlah volume sampah, menyebabkan permasalahan lingkungan yang lebih kompleks. Karena jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak diiringi dengan perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Seperti di kota Padang, perilaku dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan yang masih rendah. Penumpukan sampah di pinggir jalan sudah mengeluarkan bau busuk yang mengganggu indra penciuman dan bisa menjadi sumber penyakit.<sup>8</sup> Selanjutnya kota Bukittinggi yang terkenal sebagai kota wisata, tidak luput dari permasalahan sampah. Pada 'Program Kejut' yang dilakukan Walikota Bukittinggi HM Ramlan Nurmatias, ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan selokan yang tersumbat sampah. Menimbulkan kekecewaan Walikota, karena warga kota dengan kekotorannya yang seakan sudah 'membudaya'.<sup>9</sup>

Permasalahan lingkungan yang kompleks, menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang berdampak kepada kesehatan masyarakat. Tentunya hal ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah sebagai penjamin pelayanan, tetapi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*)

<sup>7</sup> <http://irwan-prayitno.com/2014/04/penanganan-sampah-sumbar-irwan-minta-bupati-dan-walikota-perhatikan-soal-sampah/> diakses 8 Maret 2016 Pukul : 11.00 Wib

<sup>8</sup> <http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1955408/petugas-kebersihan-di-padang-mogok-kerja> diakses 19 Juni 2016 Pukul: 17.58 Wib

<sup>9</sup> [http://www.kompasiana.com/adibermasa/19-tahun-bukittinggi-kotor\\_56d28cc508b0bde71078ab69](http://www.kompasiana.com/adibermasa/19-tahun-bukittinggi-kotor_56d28cc508b0bde71078ab69) diakses 19 Juni 2016 Pukul: 17.58 Wib

bertanggungjawab untuk terlibat dalam menjaga dan memelihara lingkungan, demi terciptanya keberlangsungan kehidupan yang sehat dan bersih.

Sesuai dengan mandat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan visi pembangunan berkelanjutan dengan rencana kerja yang diprioritaskan kepada *Good Environmental Governance* yaitu kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan rakyatnya.<sup>10</sup>

Dimana lingkungan yang terjaga baik diharapkan akan mendukung program *Good Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>11</sup> Yaitu dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.<sup>12</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, pemerintah daerah bersama masyarakat harus mampu melakukan pembenahan dan perubahan dalam pengelolaan lingkungan, yakni dengan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua pihak. Karena masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, menciptakan kota yang bersih untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Untuk terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan

---

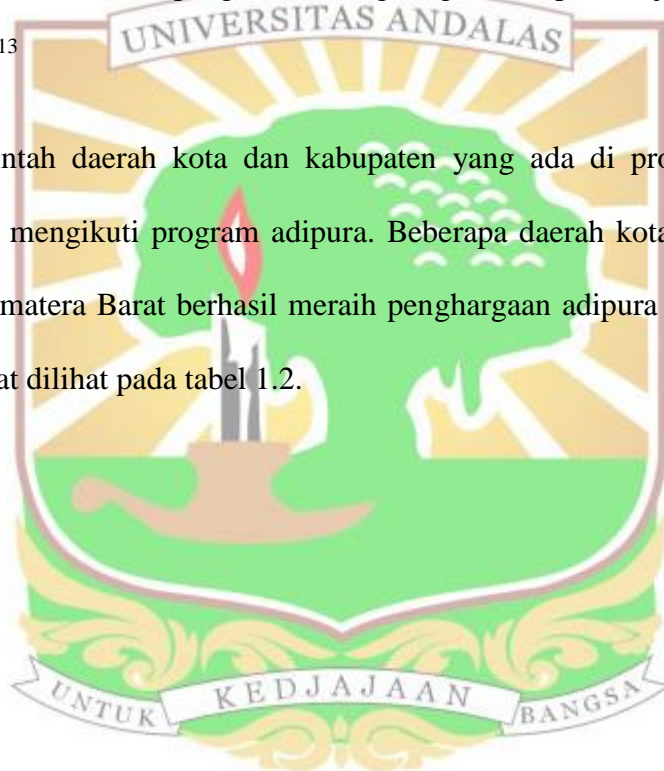
<sup>10</sup> Jurnal: Purwo Santoso. *Environmental Governance: Filosofi Alternatif Untuk Berdamai Dengan Lingkungan Hidup*. Universitas Gajah Mada. Hlm. 9.

<sup>11</sup> Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju Hlm. 7.

<sup>12</sup> <http://www.menlh.go.id/sp-rapat-koordinasi-nasional-program-adipura/> diakses 6 Maret 2016 Pukul : 20.00 Wib

program adipura, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Program tersebut sebagai dorongan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang penghargaannya dalam bentuk anugerah adipura, piagam adipura, dan plakat adipura yang diberikan terhadap kabupaten/kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Pemerintah daerah kota dan kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat antusias mengikuti program adipura. Beberapa daerah kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan adipura dalam beberapa kaategori, dapat dilihat pada tabel 1.2.



---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

**Tabel 1.2**  
**Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat Peraih Penghargaan Adipura**

Kabupaten/ Kota		Menerima Penghargaan Adipura						Keterangan
		2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	
1	Kab.Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab.Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Solok	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab.Tanah Datar	V	-	-	-	-	-	Anugrah Adipura
6	Kab.Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Agam	-	-	-	-	V	-	Piagam Adipura
8	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab.Pasaman	-	-	-	V	-	-	Anugrah Adipura
10	Kab.Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Solok	V	V	V	V	-	-	Anugrah Adipura
15	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	V	-	V	V	-	-	Anugrah Adipura
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	V	-	V	V	-	V	Anugrah Adipura
19	Kota Pariaman	-	-	-	V	-	-	Anugrah Adipura

Sumber : <https://alamendah.org/daftar-kota-peraih-adipura/> diakses 6 Maret 2016 Pukul: 20.00 Wib

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwasanya ada beberapa daerah yang berhasil meraih penghargaan adipura. Kabupaten Tanah Datar pernah meraih penghargaan adipura pada periode 2009/2010, dan kabupaten Pasaman meraih penghargaan pada periode 2012/2013. Kota Padang Panjang pernah meraih penghargaan adipura 3 kali pada periode 2009/2010,2011/2012,dan 2012/2013. Sedangkan kota



Payakumbuh berhasil meraih penghargaan adipura 4 kali pada periode 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, dan 2014/2015. Dan yang terakhir Kota Solok berhasil meraih penghargaan adipura berturut-turut dari periode 2009/2010 sampai periode 2012/2013.

Kota Solok merupakan salah satu daerah pemenang piala adipura enam kali berturut-turut dari periode 2007/2008 sampai periode 2012/2013 dalam kategori kota kecil. Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah Kota Solok beserta masyarakat, karena telah menjadikan kotanya sebagai kota yang bersih dan indah. Sehingga pada tahun 2012 Wali Kota Solok, Irzal Ilyas memberikan bonus sebesar Rp1,5 juta per orang kepada petugas kebersihan atas keberhasilan Kota Solok mempertahankan piala adipura sebanyak enam kali berturut-turut.<sup>14</sup>

Prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang selama ini telah serius dalam pengelolaan sampah di Kota Solok. Dalam pengelolaan sampah, Kota Solok berpedoman kepada *Master Plan* Pengelolaan Persampahan 2012-2031 yang dibuat pada tahun 2012 dengan melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Inasa Sakha Kirana. Pemerintah daerah Kota Solok menerapkan penanganan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*). Penanganan sampah secara 3R merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, yang lebih menekankan kepada metoda pengurangan sampah dari sumbernya. Mengurangi jumlah sampah (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mengolah sampah

<sup>14</sup> <http://PemkotSolokBeripenghargaanPasukanKuning-ANTARASumateraBarat.html>  
diakses 6 Maret 2016 Pukul : 10:36 Wib

menjadi bahan yang berguna (*recycle*). Selanjutnya sistem pengelolaan persampahan di Kota Solok meliputi : 1) sistem pewadahan, yang berbeda pada tiap-tiap sumber sampah yaitu pemukiman, pasar, komersil, institusi, dan jalan raya serta taman. 2) sistem pengumpulan, yang dibagi dalam tiga jenis yaitu pola individual langsung, individual tidak langsung, dan pola komunal langsung. 3) sistem pengangkutan, menggunakan *dump truck*<sup>15</sup> dan *arm roll truck*<sup>16</sup> dengan rotasi 2 rit/hari. 4) sistem pemrosesan akhir, dengan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kota Solok berlokasi di Ampang Kualo yang menggunakan sistem *open dumping*.<sup>17 18</sup>

Tetapi dua tahun belakangan ini Kota Solok tidak berhasil lagi meraih piala adipura, yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu menjadi langganan penerima penghargaan adipura. Jika dilihat dari indikator penilaian adipura, tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya pada saat Kota Solok memenangkan piala adipura. Hal tersebut diungkapkan Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Solok, Elsa Yolarita.

“....Tidak ada perubahan yang signifikan dari indikator-indikator Penilaian adipura. Hal tersebut bisa dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Program Adipura. Disana dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi indikator

<sup>15</sup> *Dump Truck* adalah truk dengan sistem kontainer tetap, dimana wadah pengumpulannya berupa bak beton atau yang tidak dapat dipindah-pindahkan.

<sup>16</sup> *Armroll truck* adalah truk dengan sistem kontainer angkat, dimana wadah pengumpulannya dapat dibawa-bawa/dipindahkan.

<sup>17</sup> *Open dumping* adalah metode pengurugan sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampag secara lapis-per-lapis pada sebuah lahan yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat. Dan pada akhir operasi, urugan sampah ditutup dengan tanah penutup.

<sup>18</sup> *Master Plan Pengelolaan Persampahan 2012-2031 Kota Solok Bab 4-18*

penilaian adipura.” ( Wawancara dengan Ibu Elsa Yolarita. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan KLH Kota Solok. Diwawancarai pada tanggal 11 April 2016. Pukul: 11.10 Wib)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap indikator penilaian adipura, hal ini menjadi tanda tanya kenapa Kota Solok yang sebelumnya meraih penghargaan adipura 6 kali berturut-turut tidak meraih adipura lagi.

Berdasarkan pantauan Padang Ekspres pada tanggal 20 Juli 2015 disepertaran Pasar Raya Solok, Terminal Angkot, Stasiun Kereta Api, serta sejumlah kelurahan padat penduduk seperti Pasar Pandan Air Mati, Koto Panjang, Sinapa Piliang, Sembilan Korong, Tanjung Paku, Nanbalimo, Aro Empat korong, terlihat tumpukan sampah mewabah dimana-mana. Dan aroma tidak sedap pun terasa menyengat di bak-bak sampah atau lokasi pembuangan sampah sementara di lokasi itu. Salah satu penyebab bertumpuknya sampah disebabkan petugas kebersihan yang tidak bekerja maksimal karena suasana lebaran. Sementara produksi sampah rumah tangga naik.<sup>19</sup>

Dari pantauan Padang Ekspres diatas, dapat dilihat menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dilihat dari banyaknya tumpukan sampah yang ada di tempat penampungan sementara. Selain itu petugas kebersihan juga tidak bekerja maksimal membuat penumpukan sampah bertambah parah. Hal tersebut menjadi kritikan terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok, karena pada saat lebaran sampah rumah tangga meningkat dan seharusnya petugas kebersihan juga bekerja secara maksimal. Dari observasi awal

---

<sup>19</sup> Padang Ekspres edisi 21 Juli 2015

yang dilaksanakan oleh peneliti, juga ditemukan beberapa titik penumpukan sampah di Kota Solok, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
**Lokasi Penumpukan Sampah di Kota Solok**



Lokasi Stasiun Kereta Api Kota Solok

Lokasi Gawan, Kelurahan Tanah  
Garam, Kota Solok

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016*

Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, karena masih dijumpai sampah yang berserakan disekitar lokasi permukiman dan ada yang dibuang ke sungai. Masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah yang sangat praktis, tanpa bersusah payah untuk mengangkut sampah ke TPS atau tempat sampah lainnya yang telah disediakan. Masyarakat membuang sampah dengan seenaknya ke sungai dan pinggiran sungai dengan harapan sampah tersebut akan hilang terbawa oleh aliran air sungai. Dampak negatif dari sampah yang menumpuk dibadan air dan pinggiran sungai kurang menjadi perhatian oleh masyarakat. Pemahaman yang tidak tepat ini dijumpai hampir

disetiap pelosok Kota Solok.<sup>20</sup> Dari observasi awal peneliti, juga ditemukan tumpukan sampah dipinggiran sungai, dapat dilihat pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.2.**  
**Penumpukan sampah dipinggiran sungai**



Lokasi Gawan, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016

Sebagai *leading sector* dalam pengelolaan persampahan di Kota Solok, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok harusnya lebih fokus dalam penanganan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Solok setiap tahunnya, juga berakibat terhadap naiknya jumlah rata-rata produksi sampah di Kota Solok setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini.

---

<sup>20</sup> <http://klh.solokkota.go.id/slhd/1/isu-lingkungan-hidup.html> diakses 26 februari 2016 Pukul : 11.15 wib

**Tabel 1.3**  
**Rata-Rata Produksi Sampah Per Hari Kota Solok**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi Sampah/hari (m <sup>3</sup> )
1	2010	59.396	147,00
2	2011	60.721	165,16
3	2012	62.014	168,46
4	2013	63.335	170,83
5	2014	64.684	186,16
6	2015	66.062	191,95

*Sumber : Data Produksi Sampah Kota Solok 2015, DKTR Kota Solok*

Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Solok 64.684 orang dengan jumlah rata-rata produksi sampah setiap harinya sebesar 186,16 m<sup>3</sup>. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Solok 66.062 orang dengan jumlah rata-rata produksi sampah setiap harinya sebesar 191,95 m<sup>3</sup>. Dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1.378 orang diiringi dengan kenaikan jumlah rata-rata produksi sampah setiap harinya sebesar 5,79 m<sup>3</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kenaikan jumlah penduduk juga menyebabkan peningkatan rata-rata produksi sampah setiap harinya.

Pemerintah daerah Kota Solok memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan sampah yang ada di Kota Solok, terbukti dengan besarnya anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Solok. Dalam Rekomendasi DPRD Kota Solok terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) WaliKota Solok tahun 2014 dan Laporan Akhir Masa Jabatan (LKAMJ) WaliKota Solok periode 2010-2015 pada tanggal 30 April 2015, bahwasanya untuk kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan telah dialokasikan dana

sebesar Rp.2.913.577.000,- pada Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.798.079.100,- (96,04%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Tapi dilapangan masih banyak sampah berserakan di jalan- jalan dan terlambatnya pengangkutan sampah oleh petugas sampah.<sup>21</sup>

Selain itu, Fraksi Golkar Indonesia Raya (F.GIR) DPRD Kota Solok juga meminta penjelasan kepada kepala Dinas kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok, Altani, terkait “hilangnya” penghargaan Adipura dari Kota Solok sejak dua tahun belakangan. Alasan DPRD Kota Solok menyorot kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok juga didukung oleh hasil survei lapangan terhadap keindahan dan kebersihan Kota Solok. Menurut DPRD Kota Solok wajar penghargaan adipura tidak diperoleh lagi, alasannya kota yang semakin semrawut, keindahan tata kota juga menurun. Dari hasil survei yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok dapat didefinisikan bahwa pengelolaan sampah Kota Solok tidak maksimal. Jadi adanya pertanyaan yang mendasar bagi DPRD Kota Solok apakah dana yang dianggarkan untuk pengelolaan sampah masih belum mencukupi sehingga berdampak belum maksimalnya pengelolaan sampah atau adanya faktor lain yang menyebabkan menurunnya kinerja Dinas Kebersihan Kota Solok dalam pengelolaan sampah.<sup>22</sup>

Adanya sorotan dari fraksi Golkar DPRD Kota Solok yang mengkritik tidak maksimalnya kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berkaitan dengan

<sup>21</sup> [http://humasdprdkotasolok.blogspot.co.id/2015\\_05\\_01\\_archive.html](http://humasdprdkotasolok.blogspot.co.id/2015_05_01_archive.html) diakses 26 february 2016 Pukul : 11. 15 wib

<sup>22</sup> <http://tingkapone.com/baca.php?id=284> diakses 27 Februari 2016 Pukul: 10.11 Wib

fungsi DPRD Kota Solok dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah Kota Solok termasuk Dinas Kebersihan dan Tata Ruang terkait dengan hilangnya penghargaan adipura tersebut dan juga fakta-fakta yang telah ditemukan dilapangan yang menunjukkan keindahan dan tata kota semakin menurun. Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Ramadhani Kirana Putra dari komisi III DPRD Kota Solok berikut ini.

“...yang kedua fungsi pengawasan, berkaitan dengan APBD yang telah disahkan. DPRD mengawasi kemana APBD diperuntukkan termasuk di Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok. Sementara anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang dilapangan. Contohnya ada beberapa titik kota yang kurang bersih dan berserakan seperti di Taman Kota Solok, Pasar Raya Solok, dan beberapa titik di jalan raya. Dibuktikan Kota Solok tidak mendapatkan piala adipura lagi, padahal sebelumnya Kota Solok mendapatkan piala adipura enam kali berturut-turut. Salah satu indikatornya kebersihan, padahal anggaran kebersihan sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Berarti ada kesalahan dalam pengelolaannya, baik itu dari pendistribusian tenaga kebersihan dan yang lainnya.” (Wawancara dengan Bapak Ramadhani Kirana Putra, SE, MM. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Solok. Diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2016. Pukul:10.00 Wib)

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan Tata Raung Kota Solok tahun 2014 dan 2015, terdapat penurunan capaian kinerja terkait pengelolaan sampah di Kota Solok. Dapat dilihat pada tabel 1.4.



**Tabel 1.4.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013,2014, dan 2015**

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja		
		2013	2014	2015
1.	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur pengelolaan kebersihan dan penataan ruang	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang</li> <li>- Rasio bangunan yang memiliki izin</li> <li>- Persentase luas pemukiman tertata</li> <li>- Jumlah SK <i>Advice Planing</i> yang dikeluarkan</li> </ul>	83,33	71,43	-
		121,84	103,49	305,8
		68,5	57,4	2,25
		124,28	217,50	400
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial</li> </ul>	124,54	57,14	10,66
4.	Meningkatnya pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah, dan drainase) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk</li> <li>- Meningkatnya cakupan luas pelayanan kebersihan</li> </ul>	100,56	102,69	100
		114,29	106,67	100
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase RTH tersedia</li> <li>- Pengelolaan sampah pola 3R oleh masyarakat</li> <li>- Persentase ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan</li> <li>- Persentase ketersediaan sistem penanganan sampah</li> <li>- Jumlah taman kota</li> <li>- Jumlah pohon peneduh</li> </ul>	92,86	101,15	146
		90	55	73,3
		90	91,01	100
		85,71	78,82	83,75
		103,44	3,33	41,9
		87,25	5	0,0075
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kelembagaannya dalam pengelolaan persampahan	83,33	71,43	62,5
7.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penataan bangunan	110,22	62	11,14
8.	Menurunnya pelanggaran terhadap aturan pendirian bangunan	210	394,29	500

9.	Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi kantor dan lapangan	100	100	100
----	---	-----	-----	-----

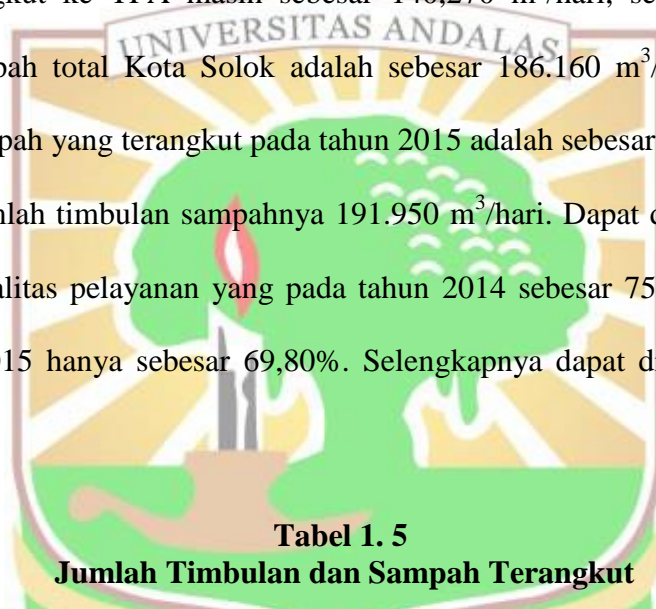
Sumber : LAKIP DKTR Tahun 2014 dan 2015

Dari tabel 1.4. dapat dilihat bahwasanya adanya penurunan capaian kinerja pada indikator sasaran *rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk* dan *cakupan luas pelayanan kebersihan*. Selain itu juga terdapat penurunan pada indikator sasaran *pengelolaan sampah pola 3R oleh masyarakat* dan juga *peran serta masyarakat dan kelembagaannya dalam pengelolaan persampahan*. Dapat disimpulkan bahwa selain adanya penurunan kinerja dalam pelayanan kebersihan dan kurangnya penyediaan tempat pembuangan sampah, juga disertai turunnya kesadaran dari masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Solok. Sehingga permasalahan persampahan di Kota Solok semakin kompleks.

Di dalam *Master Plan* Pengelolaan Persampahan Kota Solok 2012-2031 ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Solok. Yang *Pertama*, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidang persampahan. Seharusnya dalam pengelolaan persampahan suatu daerah diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang persampahan. Salah satu penyebab utama keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok yaitu masih terbatasnya pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis mengenai persampahan. Struktur organisasi yang belum ditunjang dengan kapasitas (jumlah dan kualitas) SDM yang ahli dibidang persampahan.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> *Master Plan Pengelolaan Persampahan 2012-2031 Kota Solok Bab 4-19*

Yang *Kedua*, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan teridentifikasi dari pelayanan pengelolaan persampahan belum tercakup untuk seluruh wilayah Kota Solok. Selain itu juga belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam aspek teknis dan operasional persampahan baik untuk proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah yang selanjutnya di proses di TPA.<sup>24</sup> Hal ini dapat dilihat dari volume sampah terangkut ke TPA masih sebesar 140,270 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan jumlah timbulan sampah total Kota Solok adalah sebesar 186.160 m<sup>3</sup>/hari pada tahun 2014, dan sampah yang terangkut pada tahun 2015 adalah sebesar 139.075 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan jumlah timbulannya 191.950 m<sup>3</sup>/hari. Dapat dilihat terjadinya penurunan kualitas pelayanan yang pada tahun 2014 sebesar 75,34% sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 69,80%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.5.



**Tabel 1. 5**  
**Jumlah Timbulan dan Sampah Terangkut**

Tahun	Timbulan (m <sup>3</sup> /hari)	Sampah Terangkut (m <sup>3</sup> /hari)	Pelayanan (%)
2011	165,159	110,050	44,76
2012	168,462	112,465	66,76
2013	170,831	113,790	66,61
2014	186.160	140.270	75,34
2015	191.950	139.075	69,80

Sumber : DKTR Kota Solok tahun 2015

Yang *Ketiga*, keterbatasan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan. Pada tahun 2010, total APBD Kota Solok sebesar Rp. 378.153.811.868,40 sementara alokasi anggaran pengelolaan persampahan sebesar Rp.

<sup>24</sup> *Ibid* Bab 4-18

4.624.003.550,00 (1,22% dari total APBD Kota Solok). Idealnya biaya untuk pengelolaan persampahan/kebersihan suatu kota besarnya 5-10% dari APBD.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti tentang pengukuran kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok, tapi pada penelitian ini peneliti ingin melihat apa faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah di Kota Solok. Karena dengan melihat penjelasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa adanya sorotan dari fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok mengenai kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah tidak maksimal, dan juga adanya penurunan pelayanan pengangkutan yang menyebabkan penumpukan sampah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah menurun dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat faktor apa yang menyebabkan menurunnya kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah.

Berbicara mengenai kinerja, Porter mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu: (1) sumber daya manusia, meliputi jumlah pegawai, keahlian, imbalan/upah tenaga kerja, dan etika kerja. (2) sumber daya fisik, meliputi kelimpahan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya alam. (3) sumber daya modal, meliputi jumlah modal yang tersedia, sumber modal, dan ketergantungan terhadap anggaran. (4) Infrastruktur, meliputi tipe dan

---

<sup>25</sup> *Ibid* Bab 4-20

kualitas infrastruktur yang tersedia. (5) sumber daya pengetahuan, meliputi sumber-sumber pengetahuan yang ada pada dalam suatu negara/bangsa.<sup>26</sup>

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti temukan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Solok. Sehingga peneliti memilih teori Porter karena menurut peneliti teori ini lebih relevan dengan permasalahan yang terjadi pada Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah di Kota Solok, peneliti melihat apa sajakah faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam pengelolaan sampah di Kota Solok. Apakah yang mempengaruhinya sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya modal, infrastruktur, sumber daya pengetahuan, ataukah kelima faktor tersebut sebagaimana yang terdapat dalam teori Porter. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam Pengelolaan Sampah di Kota Solok.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Merujuk pada paparan diatas, maka diambil rumusan masalah guna pembahasan sebagai batasan penelitian yaitu apa saja kah faktor yang

<sup>26</sup> Fadel Muhammad.2008. *Reinveinting Local Government*. Jakarta : Elex Media Komputindo. Hlm. 44.

mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam Pengelolaan Sampah di Kota Solok?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok dalam Pengelolaan Sampah di Kota Solok.

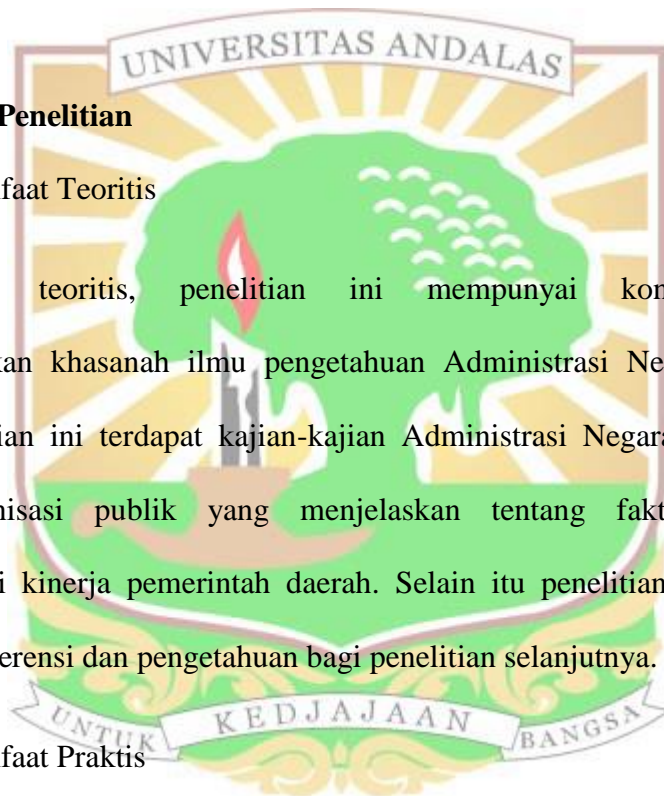
### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Negara, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Negara, yaitu tentang kinerja organisasi publik yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Dinas Kebersihan dan tata Ruang Kota Solok dan pihak terkait lainnya dalam melihat faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dan untuk bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja instansi di masa selanjutnya.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab pertama ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang beberapa aspek teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pendekatan teoritis yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional.

Bab III adalah Metode Penelitian. Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya adalah pendekatan penelitian dan desain penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.

Bab IV adalah Deskripsi Lokasi Penelitian. Bab ini menggambarkan lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

Bab V adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan

Bab VI adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan terhadap pemaparan hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap masalah tersebut.

